

	1.000	1.150	-25	1.000.000	10,20	
6.325	6.400	6.075	6.100	-225	4.303.800	7,42
855	865	805	820	-35	3.297.700	-26,24
10.075	10.200	10.050	10.150	75	940.400	6
16.300	16.275	15.525	15.725	-575	1.710.700	36,93
10.750	10.950	10.600	10.800	50	6.732.100	24,21
7.000	7.125	6.875	7.000	-	11.580.200	13,04
2.170	2.200	1.955	1.980	-190	16.261.000	-28,35
1.240	1.250	1.220	1.240	-	4.808.500	24,12
500	505	478	490	-10	16.799.400	12,72
1.445	1.465	1.425	1.435	-10	5.096.900	12,1
4.050	4.090	4.820	4.860	10	4.766.700	17,12
510	510	500	505	-5	6.190.200	7,03
1.410	1.410	1.360	1.370	-40	29.853.100	27,24
462	466	450	458	-4	2.742.000	5,3
232	236	230	232	-	99.211.700	-7,15
830	835	820	820	-10	2.242.900	90,55
825	835	760	795	-30	3.653.200	6,83
3.230	3.240	3.130	3.190	-40	2.683.800	5,66
2.010	2.030	1.995	2.020	10	2.232.500	30,91
700	710	690	690	-10	36.372.800	24,5
1.520	1.525	1.465	1.490	-30	42.586.400	9,52
1.220	1.225	1.200	1.220	-	31.942.900	21,36
1.730	1.740	1.720	1.720	-10	433.000	12,24
920	920	895	895	-25	6.966.700	17,33
2.580	2.630	2.580	2.590	10	6.422.900	52,04
7.975	8.075	7.350	7.500	-475	1.517.900	8,1
535	545	535	540	5	13.994.800	9,98
268	270	258	264	-4	19.360.600	4,1
1.495	1.525	1.480	1.505	10	66.759.400	14,95
1.415	1.425	1.340	1.350	-65	21.936.300	8,64
1.215	1.230	1.150	1.160	-55	6.210.200	112,99
52	53	52	52	-	27.547.900	11,11
282	286	276	284	2	26.239.700	13,52
1.020	1.025	1.000	1.005	-15	3.426.600	8,73
900	900	860	890	-10	61.669.100	21,32
478	482	474	480	2	5.276.500	45,95
790	805	775	800	10	74.316.600	-4.184,10
1.450	1.455	1.435	1.445	-5	2.312.800	35,94
302	310	288	288	-14	10.388.700	94,42
11.400	11.350	10.950	11.175	-225	8.015.000	38,39
54	56	53	53	-1	46.205.400	83,65
6.725	6.800	6.725	6.750	25	401.400	191,95
995	995	990	990	-5	44.400	42,42
214	218	210	210	-4	7.062.800	3,15
870	875	815	850	-20	5.570.100	29,23
1.395	1.405	1.330	1.345	-50	15.486.800	14,79
240	242	234	240	-	3.248.000	40
820	825	815	820	-	6.179.500	10,77
690	695	680	685	-5	13.399.200	-297,76
3.820	3.830	3.710	3.730	-90	66.689.800	16,84
705	710	670	680	-25	13.752.500	-21,25
191	204	190	197	6	125.884.500	2,82
316	319	300	301	-15	38.771.600	27,87
1.240	1.240	1.210	1.230	-10	18.801.500	32,42
198	200	198	198	-	124.000	9,5
7.600	7.600	7.350	7.400	-200	23.678.700	7,69
17.700	17.975	17.225	17.625	-75	5.915.400	5,71
3.280	3.300	3.150	3.180	-300	3.285.400	10.450,21
232	236	222	222	-10	34.557.300	8,58
1.140	1.150	1.100	1.100	-40	19.958.400	9,74
1.965	1.970	1.925	1.945	-20	7.374.200	9,68
274	280	270	270	-4	15.033.300	6,41
394	396	382	382	-12	2.879.900	8,23
2.860	2.860	2.650	2.710	-150	16.894.300	43,59

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abriyani Pangerapan (dari kiri ke kanan) se usai menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

# Transaksi Nontunai Tekan Kebocoran

Pemerintah memperluas penerapan transaksi nontunai. Dengan cara itu, potensi kebocoran dapat ditekan dan dana dapat terekam. Namun, pemerintah mengingatkan untuk tetap mengawasi proses ini dengan baik.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah daerah didorong mengimplementasikan retribusi elektronik dan pajak elektronik mulai tahun ini. Tujuannya, meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Hal ini seiring rencana pemerintah menerapkan transaksi berbasis nontunai. Transaksi ini melibatkan antarpemerintah serta antara pemerintah dan pihak ketiga untuk pengadaan belanja serta transaksi pemerintah dan rakyat untuk penyaluran bantuan sosial.

"Uji coba akan dilakukan untuk pajak pasar, retribusi parkir, pajak pariwisata, pajak kendaraan bermotor, serta pajak bumi dan bangunan," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, seluruh transaksi pemerintah dilakukan melalui transfer bank sehingga terekam dari level pusat hingga desa dan kelurahan. Transaksi nontunai akan menekan potensi kebocoran anggaran.

"Seluruh transaksi pemerintah dilakukan melalui transfer bank sehingga terekam dari level pusat hingga desa dan kelurahan. Transaksi nontunai akan mengurangi potensi kebocoran," kata Sri Mulyani se usai penandatanganan nota kesepahaman percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Ja-

karta, Kamis.

Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah diperluas, tidak hanya pembayaran gaji. Beberapa jenis transfer ke daerah dikirim langsung ke rekening penerima, misalnya bantuan operasional sekolah ke rekening sekolah, dana desa ke rekening kas desa, dan program keluarga harapan ke rekening warga.

Cara ini diyakini akan memperbaiki akuntabilitas dan tata kelola anggaran pemerintah daerah. Selain memastikan penyaluran dana tepat sasaran, data keuangan dari elektronifikasi transaksi juga bisa digunakan untuk menangkap potensi pendapatan asli daerah.

**Masih rentan**

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, berpendapat, elektronifikasi pada transaksi pemerintah daerah tidak menutup praktik penyimpangan dana. Menurut dia, sistem elektronik hanya sarana sistem pembayaran. Adapun permasalahan penganggaran, di antaranya penunjukan rekanan lelang barang jasa, masih rentan menjadi bahan permainan oknum pemerintah daerah.

"Di belakang sistem itu masih terbuka kongkalikong untuk menyuap oknum pemda, misalnya. Jadi, ini masalah mental. Sistem secanggih apa pun, kalau pengawasan belum optimal, celah kebocoran anggaran tetap terbuka," ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, per-

luasan elektropifikasi transaksi pemda akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan pengalaman di sejumlah daerah, elektronifikasi transaksi berpotensi meningkatkan PAD hingga lima kali lipat seperti di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

"Elektronifikasi transaksi meningkatkan PAD berlipat-lipat. Hal itu terbukti di Sleman, Banyuwangi, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah," ujarnya.

Peningkatan PAD, lanjut Perry, akan memutar roda perekonomian lebih kencang. PAD dapat dibelanjakan untuk program-program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, kebocoran anggaran banyak terjadi di pos-pos pelayanan publik. Dengan elektronifikasi transaksi, potensi kebocoran dan penyelewengan anggaran bisa ditekan.

Penyaluran anggaran dari pemerintah pusat ke daerah diyakini bisa lebih efektif dan efisien.

Implementasi elektronifikasi transaksi, lanjut Tito, diharapkan mengurangi kasus tindak korupsi yang dilakukan pemda. Kasus-kasus penyelewengan anggaran transfer ke daerah diharapkan tidak terjadi lagi.

Menurut catatan BI, transaksi berbasis nontunai baru diterapkan 31 pemerintah provinsi, 84 pemerintah kota, dan 290 pemerintah kabupaten.

KERTAS ASING			
	Jual		
AYU	BI	AYU	
13.685,00	13.747,40		13.735,00
17.720,00	17.815,26		17.945,00
9.205,00	9.249,25		9.255,00
9.870,00	9.910,18		9.920,00
3.600,00	3.665,48		3.775,00
3.310,00	3.322,23		3.360,00
1.700,00	1.769,63		1.765,00
124,5	125,03		125,75
14.845,00	14.948,92		14.995,00

  

IAH/DOLLAR AS			
20	4,75/1,20	4,75/1,30	4,75/1,30
25	5,25/0,25	5,25/0,25	5,25/0,25
30	5,75/0,50	5,75/0,50	5,25/0,50
35	6,00/0,50	6,00/0,50	6,00/0,75
40	4,75/0,25	4,75/0,25	4,75/0,25
45	5,50/1,45	4,75/1,45	4,25/1,45
50	5,75/0,05	5,50/0,05	5,25/0,05
55	5,00/0,75	5,25/0,75	5,50/0,75
60	4,00/0,35	4,00/0,75	4,00/0,85
65	5,25/0,25	5,25/0,50	5,25/0,50
70	3,50/0,60	3,50/0,60	3,50/0,60
75	4,75/1,50	4,75/1,50	4,75/1,50
80	5,25/0,50	5,50/0,50	5,50/0,50
85	5,00/0,75	5,00/0,75	5,00/0,75
90	5,50/0,75	5,50/0,75	5,50/0,75
95	5,00/0,50	5,50/0,50	5,50/0,50
100	5,00/0,30	5,00/0,30	5,00/0,30